Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Pemda Di Bakorwil Madiun

Mintarti Indartini¹, Nurharibnu Wibisono²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun

¹Email: mintarti@unmer-madiun.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Madiun

²Email: nurharibnu@unmer-madiun.ac.id

Abstract - Its research intend to determine whether local revenue (PAD), balancing funds (DP), & capital goods expenditures (BM) to the financial performance (KKPD) from city/district in Regional Coordination Agency (Bakorwil) Madiun, East Java, Indonesia partially and simultaneously. The purposive sampling method used for Madiun Regency, Magetan Regency, Ngawi Regency, Ponorogo Regency, and Madiun City for 5 years (2014-2019). The regression analysis used with SPSS program. This study conclude (1) local-generated revenue has no impact on the financial performance from districts/city at Bakorwil Madiun; (2) Balancing funds influence the financial performance from districts/city at Bakorwil Madiun; (3) Capital expenditures influence the financial performance of districts/city at Bakorwil Madiun; (4) Generally, local revenue, balancing funds, & capital expenditures have an impact to the financial performance of city/districts in Bakorwil Madiun.

Keywords: Local Revenue; Balancing Fund; Capital expenditures; Local Government Financial Performance

I. PENDAHULUAN

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Bakorwil Madiun di bawah koordinasi kepala Bakorwil, berada di bawah struktur gubernur di bawah komando Sekda provinsi Jatim. Bakorwil Madiun melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan daerah di lingkungan kerjanya. Pemda dan DPRD menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem serta prinsip NKRI menurut UUD 1945 (UU Nomor 23 tahun 2014).

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan APBD untuk alat perkiraan penerimaan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan perencanaan kegiatan keuangan daerah setahun Pemda yang didiskusikan serta disetujui antara Pemda dan DPRD, dan ditetapkan lewat Perda (Permendagri 13/2006).

Sevice excellent, keadilan dan kemakmuran merupakan tanggung jawab moral Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib membangun visi, misi, serta tujuan baik serta terukur serta mengimplementasikan strategi dan program terbaik untuk meraih tujuan mulia tersebut. *Trust* atas pemerintah akan diperoleh apabila pemerintah dinilai baik kinerjanya oleh rakyat. Guna mengukur akuntabilitas lembaga dan manajer untuk menghasilkan pelayanan publik lebih baik, maka sangat penting dilakukan pengukuran kinerja (Halim & Kusufi, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut oleh Pemda berdasarkan Perda menurut peraturan di atasnya (UU 33/2004). Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penggalan sumber dana asli daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan penerapan asas desentralisasi agar Pemda tidak tergantung pada dana transfer.

Dana Perimbangan berasal dari APBN digunakan untuk membiayai rumah tangga Pemda untuk implementasi penyerahan kekuasaan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (UU 23/2014).

Makna belanja modal yaitu dana untuk belanja pengadaan aktiva tetap berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun guna keperluan aktivitas Pemda, contohnya pengadaan mesin dan peralatan, tanah, bangunan dan gedung, jalan dan lain-lain. (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

Belanja modal berhubungan erat dengan investasi oleh Pemda. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa tercermin dari besarnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang terencana dan intensif akan menumbuhkan perekonomian wilayah dan akan berdampak pada pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan Pemda dipengaruhi secara signifikan oleh PAD serta Dana Perimbangan, secara parsial maupun simultan. Namun, kinerja keuangan Pemda dipengaruhi secara negatif oleh Dana Perimbangan (Budianto & Alexander, 2016). PAD berpengaruh signifikan atas kinerja keuangan Pemda, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pemerinath daerah (Ar Rozy & Wijayanti, 2014). Secara parsial, Kinerja Keuangan Pemda dipengaruhi oleh Dana Perimbangan dan PAD (Ayu, 2018). Kinerja Keuangan Pemda tidak dipengaruhi oleh PAD, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal (Susanti & Ratih, 2018).

Ketergantungan Pemda terhadap dana yang di-transfer ke daerah dan Dana Desa masih begitu tinggi. Rerata secara nasional, tingkat tergantung APBD pada TKDD sebanyak 80,1%. Sumbangan PAD hanya sekitar 12,87%. Artinya, Pemda relatif pasif dalam menggali potensi PAD (Sri Mulyani dalam Nugraha, 2019).

Peneliti tertarik menyelidiki bagaimana pengaruh PAD, DP dan BM pada KKPD Kabupaten/Kota di Bakorwil Madiun baik parsial maupun simultan.

Konsep Pemikiran

Konsep pemikiran yang disimpulkan dari kajian teori dan penelitian sebelumnya seperti di bawah ini.

Gambar 1. Konsep Pemikiran

Hipotesis

H₁ : PAD berpengaruh pada KKPD pada Pemda di Bakorwil Madiun.

H₂ : Dana Perimbangan (DP) berpengaruh pada KKPD pada Pemerintah Daerah di Bakorwil Madiun.

H₃ : Belanja Modal (BM) berpengaruh pada KKPD pada Pemda di Badan Koordinasi Wilayah Madiun.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini berjenis riset kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah metode penelitian berbasis pada filsafat positivisme, dijalankan pada populasi dan sampel *specific* secara representatif, proses *collecting* data digunakan instrumen penelitian, serta menggunakan analisis data kuantitatif/statistik dalam menguji hipotesis. (Sugiyono, 2014)

Populasi penelitian yaitu Pemda se-Bakorwil Madiun terdiri dari Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun. Purposive sampling penelitian bertujuan untuk mendapatkan kriteria sampel tertentu. Kriteria tersebut adalah data sekunder Laporan Realisasi APBD 5 (lima) Pemerintah Daerah se-Bakorwil Madiun tahun 2013 – 2019 yang berasal dari website www.djpk.kemenkeu.go.id. Teknik pengumpulan datanya melalui pengambilan data laporan keuangan 5 (lima) pemerintah daerah se-Bakorwil Madiun. Jumlah data penelitian sebanyak 35 data (5 Pemerintah Daerah x 7 tahun). Pendekatan asosiatif kausal digunakan untuk teknik analisis data yang dibantu oleh SPSS V-20.

Variabel independen penelitian ialah PAD (x₁), DP (x₂), dan BM (x₃). Variabel dependennya yaitu KKPD (Y) dengan pendekatan efisiensi Pemda. Efisiensi Pemda adalah relasi antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dengan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya (input) (Nordriawan dan Hertianti, 2010). Tingkat efisiensi Pemerintah Daerah tinggi jika dapat memproduksi output maksimal melalui input minimal dan sebaliknya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) adalah pencapaian hasil kerja penerimaan dan belanja daerah melalui sistem keuangan daerah berdasarkan peraturan yang ada. Perhitungan KKPD melalui pendekatan Rasio Efisiensi = Total Belanja Daerah : Total Penerimaan Daerah.

PAD (X₁) merupakan penghasilan yang didapatkan dari retribusi dan pajak daerah serta pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain PAD yang sah yang bermaksud untuk melimpahkan kekuasaan kepada Pemda guna menggali dana otoda untuk desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33/2004).

Dana Perimbangan (X₂) yaitu sumber penerimaan yang berasal dari APBN ditujukan untuk Pemda dalam mendanai operasional pembangunan pemerintah daerah guna perwujudan desentralisasi. (UU 33/2004).

Capital expenditure (BM) (X₃) ditujukan untuk pembiayaan pengadaan/pembelian atau pembangunan harta tetap berwujud yang berumur melebihi satu tahun guna kegiatan Pemda, contohnya pengadaan peralatan, gedung, irigasi, serta lainnya.

Analisis data menggunakan:

1. Pengujian statistik deskriptif
2. Pengujian asumsi klasik.
3. Regresi Berganda

$$KKPD = \alpha + b_1(PAD) + b_2(DP) + b_3(BM) + e$$

Di mana :

KKPD : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

α : Konstanta

PAD : Pendapatan Asli Daerah (X₁)

DP : Dana Perimbangan (X2)

BM : Belanja Modal (X3)

e : Error

4. Uji R^2

5. Uji t

6. Uji F

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif seperti terlihat di bawah ini (tabel 1).

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	35	25,15	26,45	25,9209	,35098
DP	35	27,12	28,13	27,8091	,30266
BM	35	25,43	26,78	26,2906	,34135
KKPD	35	,71	1,26	,9760	,09450
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS 20

Penjelasan statistik deskriptif penelitian ini sebagai berikut:

- Mean* KKPD sebesar 0,976, standar deviasi bernilai 0,0945, maximum bernilai 1,26 serta nilai minimum 0,71.
- Rata-rata PAD bernilai 25,92 atau Rp 191.059.112.991 dan standar deviasi menunjukkan angka 0,35098. Nilai minimumnya adalah 25,15 atau Rp 83.428.636.445,32 mengarah pada Kab. Madiun periode 2013. Maximum bernilai 26,45 atau Rp 307.514.848.129,46 terdapat pada kab. Ponorogo periode anggaran 2017.
- Nilai *mean* variabel DP adalah 27,8091 atau Rp 1.242.121.924.282,17 dan standar deviasi menunjukkan angka 0,30266. Nilai minimumnya adalah 27,12 atau Rp 5.97.215.788.294 terdapat pada kota Madiun periode 2015. Maksimum bernilai 28,13 atau Rp 1.639.116.773.741 terdapat pada kab. Ngawi periode 2015.
- Nilai *mean* variabel BM sebesar 0,9760 atau Rp 275.946.244.015,304 dengan standar deviasi sebesar 0,34135. Minimum bernilai 25,43 atau Rp 110.848.141.315 adalah kab. Ponorogo periode 2013 serta maksimum sebesar 26,78 atau Rp 427.143.914.658 adalah kab. Ponorogo periode 2019.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Kenormalan Data

Data normal diuji melalui *Kolmogrov-Sminorv* seperti terdapat di bawah ini.

**Tabel 2. Pengujian Kenormalan
One-Sample K-S**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.07803160
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.069
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.442
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Olahan data sekunder SPSS 20

Perhitungan uji *KS* memperlihatkan angka signifikan senilai $0,990 > 5\%$. Hal inimenunjukkan model regresi bisa dilanjutkan disebabkan karena distribusi data penelitian normal.

b. Pengujian Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas pada tabel 3 menunjukkan variabel-variabel penelitian memiliki angka VIF < 10 serta angka *tolerance* > dari 0,1. Artinya, tidak ada masalah multikolinier pada regresi.

Tabel 3. Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	.497	2.011
DP	.888	1.126
BM	.464	2.153

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS 20

c. Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 2 mengindikasikan kalau data acak dan tidak berpola tertentu, terdapat di atas dan di bawah nilai 0 di sumbu Y. Artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas atas regresi.

Gambar 2. Heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS 20

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4 menunjukkan data sebanyak (n) 35 buah dengan variabel bebas (k) 3 buah. Nilai *Durbin-Watson* terdapat di dalam du serta 4-du dengan rumus $du < dw < 4-du$. Hasilnya adalah $1.653 < 2.026 < 2.347$. Artinya bahwa dalam model regresi tanpa autokorelasi antar variabel independen.

Tabel 4. Autokorelasi dan Ketetapan Model (R^2)

Model	R	R^2	Adj. R^2	Std. Error of the Estimate	D-W
1	.564 ^a	.318	.252	.08172	2.026

Sumber : Olahan data sekunder SPSS 20

3. Regresi

Tabel 5. Pengujian Regresi

Model	Unstandardized Coef.		Standardized Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Konstan)	1.375	1.516		.907	.371
1 PAD	.016	.057	.061	.289	.775
DP	-.148	.049	-.475	-3.021	.005
BM	.126	.060	.454	2.087	.045

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS 20, 2021

$$\text{KKPD} = 1.375 - 0,016X_1 - 0,148X_2 + 0,126X_3 + e$$

Pada tabel 5, *constant*a sebesar 1.375 menunjukkan apabila variabel PAD, DP, serta BM berangka nol, menyebabkan KKPD senilai 1,375. Koefisien regresi PAD sebesar 0,016 menunjukkan apabila PAD naik satu satuan, maka KKPD akan meningkat 0,016 dengan anggapan variabel bebas lainnya stagnan.

Dana Perimbangan mempunyai nilai koefisien regresi -0,148. Artinya, apabila Dana Perimbangan meningkat sebanyak satu satuan, berdampak KKPD turun sebanyak -0,148 apabila variabel bebas lain tidak berubah.

Belanja Modal memiliki koefisien regresi senilai 0,126. Artinya apabila BM naik sebanyak satu satuan, maka KKPD akan naik pula sebanyak 0,126 dengan anggapan variabel bebas yang lain tetap.

4. Uji Signifikansi Simultan

Tabel 6. Uji F (Anova)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regresi	.097	3	.032	4.822	.007 ^b
Residual	.207	31	.007		
Total	.304	34			

a. Variable Terikat: K

b. Predictors: (Konstan), BM, DP, PAD

Nilai uji F adalah 4,822 > F tabel (2,911), angka signifikan 0,007 < 5%. Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap KKPD.

5. Pengujian R²

Angka koefisien determinasi (tabel 4) menghasilkan nilai *Adj. R²* sebanyak 25,2%. Artinya, perubahan naik atau turunnya KKPD Kabupaten/Kota di Bakorwil Madiun dapat dijelaskan oleh indikator-indikator pendorong KKPD ialah, PAD, DP, dan BM hanya 25,2%. Sisanya 74,8% disebabkan oleh variabel di luar penelitian sekarang.

6. Uji t

PAD mempunyai koefisien beta senilai 0,016, dengan signifikansi 0,775 > 0,05. Angka t hitung ialah 0,289 < 2,032 (t tabel). Hal ini menjelaskan bahwa KKPD tidak dipengaruhi oleh PAD pada Kota/Kabupaten di Bakorwil Madiun.

DP mempunyai koefisien beta senilai -0,148, dengan signifikansi 0,005 < 0,05. Hasil t hitung yaitu -3,021 < 2,032 (t tabel). Hal ini membuktikan bahwa DP mempengaruhi KKPD di Kabupaten/Kota pada Bakorwil Madiun.

BM mempunyai koefisien beta sebanyak 0,126, dengan signifikansi 0,045 < 0,05. Hasil t hitung yaitu 2,087 > 2,032 (t tabel). Hal ini membuktikan bahwa BM mempengaruhi KKPD.

7. Pembahasan

a. Pengaruh PAD pada KKPD

Pengujian SPSS menunjukkan bahwa terhadap KKPD tidak dipengaruhi oleh PAD di Kota/Kabupaten pada Bakorwil Madiun. PAD merupakan sumber pokok pendapatan daerah yang sangat mempengaruhi peruntukan belanja untuk keadilan kue pembangunan dan kemakmuran daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD Kota/Kabupaten di Bakorwil Madiun perlu digali potensinya dan dikembangkan secara kuantitas dan kualitasnya agar kontribusinya signifikan pada peningkatan KKPD. Penggalan potensi PAD bisa dikenakan kepada usaha individu, swasta, juga BUMD.

Pemda bisa menjalankan optimalisasi dan perluasan pendapatan retribusi serta pajak. Selanjutnya Pemda perlu meningkatkan pendapatan pengelolaan aset daerah terpisah serta PAD lainnya secara sah mengacu pada peraturan berlaku.

Output penelitian sekarang sejalan dengan PAD tidak berpengaruh pada KKPD pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Susanti & Ratih, 2018). Namun berseberangan dengan hasil penelitian bahwa KKPD dipengaruhi PAD (Budianto & Alexander, 2016), (Ar Rozy & Wijayanti, 2014), serta (Ayu, 2018).

b. DP berpengaruh pada KKPD

Pengujian statistik menunjukkan bahwa KKPD Kota/Kabupaten di Bakorwil Madiun dipengaruhi oleh DP. Alokasi DP dari Pusat merupakan komponen utama pos pendapatan daerah. Hal ini sangat mempengaruhi penentuan alokasi belanja daerah.

Meningkatnya Dana Perimbangan akan berakibat positif pada sumber dana proyek pembangunan dan program Pemda. Pemda harus dapat mengurus secara baik DP (transfer) yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Mengingat PAD belum bisa digali secara optimal menyebabkan Pemda begitu menggantungkan pada DP dari Pusat. Inilah penyebab DP berpengaruh terhadap KKPD. Dana Perimbangan terdiri dari komponen DBH Pajak serta non Pajak, DAU serta DAK. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengatasi kekurangan Belanja Daerah. Sewajarnya Pemerintah Daerah berusaha mandiri dan tidak menggantungkan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk mengatasii belanja daerahnya melalui optimalisasi potensi PAD.

Kesimpulan penelitian ini sesuai dengan pernyataan, DP berpengaruh terhadap KKPD (Budianto & Alexander, 2016) dan (Ayu, 2018). Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian, DP tidak berpengaruh terhadap KKPD (Ar Rozy & Wijayanti, 2014).

c. Pengaruh BM pada KKPD

Analisis regresi menyimpulkan bahwa KKPD dipengaruhi oleh BM. Ha ini mengindikasikan jika BM tinggi, maka KKPD meningkat juga.

Sebaiknya pembangunan infrastruktur pada Kota/Kab. di Bakorwil Madiun menunjukkan alokasi BM yang efisien dan efektif. Oleh karena itu Belanja Modal perlu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi dengan baik karena dapat menaikkan KKPD pada Bakorwil Madiun. Kesimpulan riset ini berseberangan dengan studi Susanti & Ratih (2018) yang menunjukkan BM tidak berpengaruh pada KKPD di Kota/Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh pada KKPD. DP berpengaruh terhadap KKPD. BM berpengaruh pada KKPD. Secara simultan PAD, DP, dan BM berpengaruh pada KKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Rozy, M., & Wijayanti, P. (2014). The Influence of the Audit Opinion, the Original Area of Revenue and the Equalization Fund To Regional Financial Performance (Empirical Studies On Local Governments That Exist In Central Java). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 81–100.
- Ayu, Putri Puspita. (2018). Analisis PAD dan DP Terhadap KKPD Se-Jawa Barat. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)* FE Universitas PGRI Kediri Vol. 3 No. 1, Maret 2018. ISSN: 2541-0180.. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Budianto, & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD Dan DP Terhadap KKP Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- Halim, Abdul, & Kusufi, Muhammad Syam. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraha, Y. N. (2019). desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah. Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah%0D>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Refi & Ratih, Asri Eka (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Diprovinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016. *Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)*, (9), 1–17. Retrieved from <http://repository.umrah.ac.id/id/eprint/1585>
- www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd (2021)